



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT**

Oleh :

FERIZA RIZKY
06151063

Mahasiswa Program Strata 1 (S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi


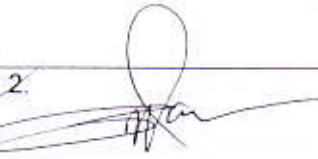

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**PADANG
2010**

	No. Alumni Universitas	FERIZA RIZKY	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		
<p>a) Tempat/tanggal lahir : Padang / 25 April 1988 b) Nama Orang Tua : Amrial & Firda Lelita c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151063 f) Tanggal Lulus : 27 Agustus 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,26 i) Lama Studi : 4 tahun h) Alamat Orang Tua : Jl. Pepaya II No. 16, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang.</p>			
<p>Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Skripsi S1 oleh: Feriza Rizky Pembimbing Skripsi: Drs. Wirzon B, MS</p>			
Abstrak			
<p>Skripsi ini membahas tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat. Adapun variabel-variabel yang diamati adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Setelah melakukan pengolahan data dengan metoda analisa regresi linear berganda dengan menggunakan data panel, maka diperoleh suatu penemuan empiris yang memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Barat.</p>			

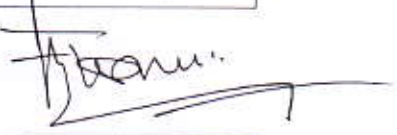
Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 27 Agustus 2010

Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. Wirzon B, MS	Drs. Zulkarnaini Ras, M.Si	Drs. Abdul Karib, M.Si

Mengetahui,
 Ketua Jurusan **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**

NIP. 130 812 952


 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas		Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas		Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal diimplementasikan di Indonesia sejak 1 Januari 2001. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberikan kewenangan pengelolaan keuangan lebih luas, yang meliputi kebebasan penentuan jumlah maupun jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta alokasi hasil-hasil penerimaan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi tersebut diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000.

Menurut Djoko Sudantoko (2005), salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mengurangi disparitas alokasi sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan pemerataan pembangunan antardaerah. Makna dari kebijakan ini adalah terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pada mulanya implementasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal didasari oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Bahkan jauh sebelum itu, sebenarnya ide awal mengenai desentralisasi fiskal sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Namun, dalam penyelenggaraannya lebih menitikberatkan pada pemerintahan yang sentralistik. Pada prinsipnya, baik UU No.22 Tahun 1999 maupun yang telah direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 isinya adalah mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator (Landiyanto, 2005).

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah semakin bertambah, sehingga membutuhkan anggaran daerah yang lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, sumber pembiayaan desentralisasi fiskal berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang sah. Dengan keleluasaan kewenangan daerah dalam penentuan jumlah dan jenis pajak serta retribusi, diharapkan daerah mampu meningkatkan PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah, karena pajak dan retribusi merupakan komponen utama PAD.

Sebelum kebijakan desentralisasi fiskal diimplementasikan, kontribusi sumber keuangan daerah yang berasal dari PAD terhadap pengeluaran daerah, masih sangat kurang, khususnya pengeluaran belanja pembangunan (Yani, 2004). Selain itu, menurut Putra (2003), komponen penerimaan yang berpengaruh terhadap belanja pembangunan adalah dana perimbangan. Jadi, belanja pembangunan sebagai wujud investasi pembangunan masih bergantung dari sumber-sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal kabupaten kota di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil analisa selama tujuh tahun diperoleh nilai R^2 yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang besar terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Sumatera Barat.
2. Selama periode tahun 2001-2007 rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riil Sumatera Barat cukup tinggi, yakni mencapai 41,68% tiap tahunnya.
3. Rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan Riil Sumatera Barat jauh lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan PAD, yaitu sebesar 284,02% tiap tahunnya. Tingginya pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Sumatera Barat masih bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat.
4. Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Modal riil kabupaten/kota Sumatera Barat selama periode 2001-2007 adalah sebesar 234,13% tiap tahunnya.
5. Berdasarkan hasil regresi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Sumatera Barat. Hasil ini dapat dilihat dari nilai t-test yang lebih besar dari t-tabel

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Abdullah, Syukriy & Halim, Abdul. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi VI : Surabaya.
- Aragon, Fernando and Gayoso, Vilma. 2005. *Intergovernmental Transfer and Fiscal Effort in Peruvian Local Governments*. MPRA.
- Aswin M. 2005. *Dampak Implementasi Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pendekatan Balanced Scorecard*. (Disertasi). Universitas Brawijaya : Malang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2003-2004*. Jakarta : BPS.
- Bappeki. 2006. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta : Depkeu RI.
- Editorial Media Indonesia. *Menggenjot Belanja Modal*. Edisi 25 Agustus 2008.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hariyanto dan Priyo Hari Adi. 2006. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. (Skripsi). Universitas Kristen Satya Wacana : Salatiga.